

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada kelompok pengeluaran per kapita 40 persen terendah di Indonesia, partisipasi murni pendidikan SMP dan SMA memiliki karakteristik yang relatif sama. Rumah tangga kelompok pengeluaran per kapita 40 persen terendah tersebar di wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan proporsi anak usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP dan anak usia 16-18 tahun sebagai murid SMA di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Tingkat partisipasi murni SMP dan SMA anak perempuan pada rumah tangga kelompok ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi murni anak laki-laki. Berdasarkan pendidikan kepala rumah tangga, anak yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan \geq SMA memiliki tingkat partisipasi murni SMP dan SMA yang tinggi daripada anak yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan lebih rendah. Sementara itu berdasarkan status ekonomi rumah tangga, tingkat partisipasi murni SMP dan SMA anak dari rumah tangga miskin masih lebih rendah dibandingkan dengan anak dari rumah tangga kategori tidak miskin. Sebagian besar anak usia 13-18 tahun dari rumah tangga kelompok pengeluaran 40 persen terendah tidak memperoleh PIP. Tingkat partisipasi murni SMP dan SMA anak yang memperoleh PIP lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak memperoleh PIP.

Pada anak usia 13-18 tahun dari rumah tangga kelompok pengeluaran 40 persen terendah, analisis regresi logistik menghasilkan bahwa:

1. Keberadaan Program Indonesia Pintar (PIP) berpengaruh positif terhadap probabilita memperoleh akses pendidikan SMP dan SMA. PIP mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap probabilita anak usia 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan SMA dibandingkan terhadap probabilita anak usia 13-15 tahun untuk memperoleh pendidikan SMP.
2. Perbedaan karakteristik penerima manfaat PIP memberikan dampak PIP yang berbeda terhadap probabilita bersekolah SMP ataupun SMA. Pada anak usia 13-15 tahun, PIP mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap probabilita

bersekolah SMP sederajat pada anak laki-laki dibandingkan perempuan, anak yang mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan maksimal hingga SMP sederajat dibandingkan dengan anak yang memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan minimal SMA, anak yang berasal dari rumah tangga kategori tidak miskin dibandingkan anak dari rumah tangga miskin dan anak yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan anak yang tinggal di wilayah perdesaan. Pada anak usia 16-18 tahun, pengaruh PIP terhadap probabilitas bersekolah SMA sederajat lebih dominan pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, anak yang mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan maksimal hingga SMP sederajat dibandingkan dengan anak yang memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan minimal SMA, anak yang berasal dari rumah tangga kategori tidak miskin dan anak yang tinggal di wilayah perdesaan dibandingkan dengan anak yang tinggal di wilayah perkotaan.

3. Pada anak 13-15 tahun, terdapat perbedaan kecenderungan untuk memperoleh pendidikan SMP yang disebabkan oleh faktor interaksi PIP dan pendidikan kepala rumah tangga. Anak yang mempunyai kepala rumah tangga berpendidikan $<SMA$ lebih diuntungkan dengan adanya PIP. Anak yang memperoleh PIP dan mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan $<SMA$ mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan SMP dibandingkan dengan anak yang memperoleh PIP mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan $\geq SMA$, dan anak yang tidak memperoleh PIP.
4. Pada anak usia 16-18 tahun, terdapat perbedaan untuk memperoleh pendidikan SMA yang disebabkan oleh faktor interaksi PIP dan jenis kelamin, interaksi PIP dan pendidikan kepala rumah tangga, dan interaksi PIP dan wilayah tempat tinggal. Probabilitas untuk memperoleh pendidikan SMA lebih besar pada anak yang memperoleh PIP berjenis kelamin perempuan dibandingkan anak laki-laki yang memperoleh PIP, dan anak laki-laki maupun perempuan yang tidak memperoleh PIP. Probabilitas untuk memperoleh pendidikan SMA lebih besar pada anak yang memperoleh PIP dengan pendidikan kepala rumah tangga $<SMA$ dibandingkan dengan anak yang mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan $\geq SMA$, dan anak yang tidak memperoleh PIP dengan pendidikan kepala rumah tangga $<SMA$ atau $\geq SMA$.

5. Pada interval kepercayaan 95 persen, perbedaan peluang anak usia 13-15 tahun memperoleh pendidikan SMP sederajat dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pengeluaran per kapita rumah tangga, status ekonomi rumah tangga, wilayah tempat tinggal, dan interaksi PIP dengan pendidikan kepala rumah tangga. Sementara itu pada tingkat kepercayaan 90 persen, selain variabel-variabel tersebut masih terdapat variabel PIP yang mempengaruhi probabilitas anak usia 13-15 tahun memperoleh pendidikan SMP sederajat.
6. Pada interval kepercayaan 95 persen, perbedaan peluang anak usia 16-18 tahun memperoleh pendidikan SMA sederajat dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita rumah tangga, status ekonomi rumah tangga, wilayah tempat tinggal, dan interaksi PIP dengan pendidikan kepala rumah tangga, dan interaksi PIP dengan wilayah tempat tinggal. Sementara itu pada tingkat kepercayaan 90 persen, selain variabel-variabel tersebut masih terdapat variabel interaksi PIP dan jenis kelamin yang mempengaruhi probabilitas anak usia 16-18 tahun memperoleh pendidikan SMA sederajat.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi murni SMP dan SMA anak yang berasal dari rumah tangga pada kelompok tingkat kesejahteraan 40 persen terendah, maka pemerintah hendaknya dapat meningkatkan cakupan penerima manfaat program transfer tunai seperti PIP kepada anak yang berasal dari rumah tangga kelompok tingkat kesejahteraan 40 persen terendah. Hal ini mengingat bahwa cakupan penerima manfaat PIP yang masih rendah dan PIP yang berpengaruh positif dalam mendorong peningkatan probabilitas untuk dapat bersekolah SMP dan SMA.
2. Pemerintah agar lebih meningkatkan pemerataan pembangunan perekonomian dan pemerataan ketersediaan sarana publik antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pemerataan pembangunan pendidikan salah satunya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan SD, SMP, dan SMA dalam sekolah satu atap di

wilayah perdesaan untuk meningkatkan ketersediaan sarana pendidikan menengah di wilayah perdesaan.

3. Pemerintah hendaknya dapat menggalakkan program upaya peningkatan level pendidikan orang tua khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin atau kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan program pendidikan secara gratis untuk Paket B, Paket C, hingga perguruan tinggi kepada orang tua yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu.
4. Berkenaan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan variabel. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keputusan untuk memperoleh pendidikan SMP dan SMA pada tingkat wilayah kecamatan/desa. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut, hasil estimasi mungkin akan lebih baik jika menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi keputusan bersekolah seperti faktor keberadaan sekolah di lingkungan tempat tinggal sampel, interaksi antara bantuan pemerintah dan beasiswa dari pihak lain, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pada tingkat desa/kecamatan sehingga diharapkan dapat menangkap lebih jauh faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bersekolah

